

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 4 NO. 2, DESEMBER 2013

ISSN: 2086-6313

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN
SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

Ari Mulianta Ginting dan Galuh Prila Dewi

KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA

Izzaty dan Rafika Sari

**ANALISIS DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN,
KESEHATAN, DAN PENGELUARAN SUBSIDI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**

Misdawita dan A. Arini Putri Sari

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN ANALISIS TABEL I-O TAHUN 2005:
STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Rita Helbra Tenrini

**STRUKTUR PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR POTENSIAL KOTA BATAM
DAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Mandala Harefa

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Lukman Adam dan T. Ade Surya

**PENGARUH *BUDGET DEFICIT* TERHADAP *CURRENT ACCOUNT DEFICIT*:
STUDI EMPIRIS DI ASEAN-5**

Eka Budiyantri

**PEMERINGKATAN FAKTOR KEBERLANGSUNGAN USAHA INDUSTRI KREATIF
DI KOTA SURAKARTA**

Deny Dwi Hartomo dan Malik Cahyadin

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 4 NO. 2, DESEMBER 2013

ISSN: 2086-6313

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v-vi
Abstrak	vii-xiv
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA	
<i>Ari Mulianta Ginting dan Galuh Prila Dewi</i>	117-130
KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA	
<i>Izzaty dan Rafika Sari</i>	131-145
ANALISIS DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PENGELUARAN SUBSIDI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA	
<i>Misdawita dan A. Arini Putri Sari</i>	147-161
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN ANALISIS TABEL I-O TAHUN 2005: STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
<i>Rita Helbra Tenrini</i>	163-174
STRUKTUR PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR POTENSIAL KOTA BATAM DAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
<i>Mandala Harefa</i>	175-193
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA	
<i>Lukman Adam dan T. Ade Surya</i>	195-211
PENGARUH <i>BUDGET DEFICIT</i> TERHADAP <i>CURRENT ACCOUNT DEFICIT</i>: STUDI EMPIRIS DI ASEAN-5	
<i>Eka Budiyantri</i>	213-224
PEMERINGKATAN FAKTOR KEBERLANGSUNGAN USAHA INDUSTRI KREATIF DI KOTA SURAKARTA	
<i>Deny Dwi Hartomo dan Malik Cahyadin</i>	225-236
Indeks Pengarang	
Indeks Subjek	
Pedoman Penulisan	

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

KATA PENGANTAR

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 tahun 2013, hadir di hadapan pembaca yang budiman sebagai bagian dari proses diskusi atas temuan dan pandangan para penulis yang menekuni bidang ekonomi dan kebijakan publik. Ada delapan judul tulisan yang mencerminkan persoalan yang menarik dan aktual, baik secara pemikiran dan data, sehingga dapat membantu kita dalam memahami perkembangan ekonomi dan kebijakan publik di Indonesia saat ini.

Tulisan pertama berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Keuangan terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia” ditulis oleh Ari Mulianta Ginting dan Galuh Prila Dewi. Penulis membahas pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan sektor keuangan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dalam mengkaji dua pengaruh di sektor ekonomi tersebut terhadap kemiskinan penulis menggunakan metode VAR dengan estimasi data dari tahun 2000-2012. Hasilnya menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan, di mana pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan pertumbuhan sektor keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Selanjutnya tulisan kedua ditulis oleh Izzaty dan Rafika Sari dengan judul “Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia” mendiskusikan persoalan penetapan upah minimum. Tulisan ini mendeskripsikan tahapan penetapan upah minimum dan kebijakan yang mempengaruhi penetapan upah minimum di Indonesia. Dalam pandangan penulis, penetapan upah minimum masih menghadapi kendala di antaranya menyangkut mekanisme yang bersifat *ad hoc* dan tidak pasti, sehingga upah minimum sulit diprediksi dan diperhitungkan. Selain itu, pertimbangan yang dijadikan dasar penetapan upah minimum yang ada hanya memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) dan belum memperhatikan faktor lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan usaha marginal.

Pada tulisan ketiga dengan judul “Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia” ditulis oleh Misdawita dan A. Arini Putri Sari. Secara khusus penulis menyoroti pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan subsidi. Penulis menggunakan metode estimasi *Error Correction Model (ECM)* dan *Ordinary Least Square (OLS)* dalam menganalisis data. Hasilnya bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, namun tidak dengan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan subsidi. Hal ini sebagai akibat dari tidak tepat sasaran pengguna subsidi di lapangan.

Tulisan keempat berjudul “Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Analisis Tabel I-O Tahun 2005: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” yang ditulis oleh Rita Helbra Tenrini. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif deskriptif yang meliputi analisis Indeks Daya Penyebaran (IDP) atau *forward linkages effect ratio* dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) atau *backward linkages effect ratio*, yang berasal dari pengolahan Tabel I-O. Dari pengolahan Tabel I-O terdapat 4 sektor kunci yang memiliki IDP dan IDK di atas rata-rata (>1) yaitu (a) bangunan, (b) industri besi dan baja, (c) usaha bangunan dan jasa perusahaan, dan (d) komunikasi. Jika pemerintah daerah memfokuskan belanja daerah pada sektor-sektor yang menjadi sektor kunci dalam perekonomian sesuai dengan analisis Tabel I-O maka kualitas belanja daerah akan meningkat dan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih dan *multiplier effect* yang lebih besar dalam perekonomian.

Tulisan kelima ditulis oleh Mandala Harefa dengan judul “Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kota Batam dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau” yang membahas persoalan bagaimana pemerintah daerah mengembangkan potensi ekonominya. Metode analisis yang digunakan adalah *Location Quotients (LQ)*. Hasilnya menunjukkan bahwa Kota Batam dan Kabupaten Karimun memiliki basis ekonomi yang berbeda. Di mana Kota Karimun memiliki potensi ekonomi yang lebih banyak sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan hal tersebut seharusnya dapat menjadi andalan. Oleh sebab itu, Kota Batam dan Kabupaten Karimun meskipun sebagai kawasan perdagangan bebas, belum mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Tulisan keenam ditulis oleh Lukman Adam dan T. Ade Surya berjudul “Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia”, di mana secara luas membahas persoalan pengembangan sektor perikanan

dan dukungan lingkungan. Dalam pandangan penulis sektor perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan hutan mangrove. Dalam kenyataannya kondisi ekosistem tersebut menurun kualitasnya, sehingga penulis merekomendasikan kebijakan konservasi untuk menjaga keberlangsungan pengembangan perikanan.

Tulisan ketujuh berjudul “Pengaruh *Budget Deficit* terhadap *Current Account Deficit*: Studi Empiris di ASEAN-5” yang ditulis oleh Eka Budiyantri. Hasil dari analisis data panel periode tahun 2006-2012 menunjukkan bahwa *current account deficit* tidak merespon perubahan yang terjadi pada *budget deficit*. Selain itu, tabungan dan investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *current account deficit*. Tabungan memiliki efek positif terhadap *current account deficit* sedangkan investasi memiliki efek negatif terhadap *current account deficit*. Tidak ada ruang sedikitpun untuk mengontrol *trade openness* dalam mempengaruhi *current account deficit*, karena hasil estimasi menunjukkan *trade openness* tidak mempengaruhi *current account deficit* pada perekonomian ASEAN-5.

Tulisan kedelapan berjudul “Pemeringkatan Faktor Keberlangsungan Usaha Industri Kreatif di Kota Surakarta” yang ditulis oleh Deny Dwi Hartomo dan Malik Cahyadin. Berdasarkan hasil analisis dengan metode AHP, dapat disimpulkan bahwa prioritas faktor penentu keberlangsungan usaha industri kreatif di Kota Surakarta adalah faktor keluarga, kondisi lingkungan, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, kemitraan usaha, manajemen dan keuangan, produksi, pasar dan pemasaran. Sedangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha berkait erat dengan prioritas faktor penentu keberlangsungan usaha tersebut. Sementara langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta berkaitan erat dengan kebijakan pengembangan usaha kreatif dan integrasi pelaksanaan program dengan berbagai instansi.

Demikian sekilas pengantar dari tulisan-tulisan yang dimuat dalam edisi kali ini. Besar harapan redaksi, tulisan-tulisan yang disajikan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pembaca, terutama Anggota Dewan yang terhormat. Redaksi sangat terbuka atas saran dan masukan dari pembaca yang budiman, demi meningkatkan kualitas dari jurnal di masa mendatang. Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, Desember 2013
Redaksi JEKP

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 4 NO. 2, DESEMBER 2013

ISSN: 2086-6313

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi

Ari Mulianta Ginting (P3DI Setjen DPR-RI) dan **Galuh Prila Dewi** (P3DI Setjen DPR-RI)

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

JEKP, Vol. 4 No. 2, Desember 2013, hal. 117-130

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk tentu membawa dampak timbulnya kemiskinan. Berbicara masalah kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan sejak tahun 1976. Ada dua tujuan dari kajian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dan tujuan yang kedua adalah mengetahui pengaruh pertumbuhan sektor keuangan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode VAR dengan estimasi data dari tahun 2000 hingga tahun 2012. Penurunan kemiskinan ini dapat terjadi akibat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor keuangan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dari penelitian juga didapatkan hasil bahwa pertumbuhan sektor keuangan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sektor keuangan

Izzaty (P3DI Setjen DPR-RI) dan **Rafika Sari** (P3DI Setjen DPR-RI)

KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA

JEKP, Vol. 4 No. 2, Desember 2013, hal. 131-145

Abstrak

Penetapan upah minimum berperan dalam meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja. Kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak ke seluruh distribusi upah, harga, iklim usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Paper ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penetapan upah minimum dan kebijakan yang mempengaruhi penetapan upah minimum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam membahas studi ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang ada. Penetapan upah minimum masih menghadapi kendala di antaranya mekanisme bersifat *ad hoc* dan tidak pasti sehingga upah minimum sulit diprediksi dan diperhitungkan. Penetapan upah minimum yang ada saat ini hanya memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan belum memperhatikan faktor lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan usaha marginal. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menaikkan upah minimum untuk menghindari sejumlah masalah berupa tingkat ketidapatuhan yang tinggi dan menghambat ekspansi lapangan kerja. Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja.

Kata kunci: kebijakan upah minimum, produktivitas, kebutuhan hidup layak, pekerja

Misdawita (Universitas Indonesia) dan A. Arini Putri Sari (Universitas Indonesia)

ANALISIS DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PENGELUARAN SUBSIDI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

JEKP, Vol. 4 No. 2, Desember 2013, hal. 147-161

Abstrak

Permasalahan kemiskinan di Indonesia bukanlah sebuah isu yang baru lagi. Kemiskinan, di samping pengangguran dan ketimpangan sosial merupakan masalah klasik yang besar dan mendasar di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengeluaran subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode estimasi *Error Corection Model (ECM)* dan *Ordinary Least Square (OLS)*. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, namun tidak dengan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan subsidi akibat tidak tepat sasaran pengguna subsidi di lapangan.

Kata kunci: pengeluaran pemerintah, kesehatan, pendidikan, subsidi, kemiskinan

Rita Helbra Tenrini (Kementerian Keuangan)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN ANALISIS TABEL I-O TAHUN 2005: STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JEKP, Vol. 4 No. 2, Desember 2013, hal. 163-174

Abstrak

Penelitian ini ingin mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Bangka Belitung menggunakan analisa Tabel Input Output (I-O) Tahun 2005. Metode penelitian menggunakan analisa kuantitatif deskriptif, yang berasal dari data sekunder, dokumen dan literatur yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis Indeks Daya Penyebaran (IDP) atau *forward linkages effect ratio* dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) atau *backward linkages effect ratio*, yang berasal dari pengolahan Tabel I-O. Dari pengolahan Tabel I-O terdapat 4 sektor kunci yang memiliki IDP dan IDK di atas rata-rata (>1) yaitu: (a) bangunan, (b) industri besi dan baja, (c) usaha bangunan dan jasa perusahaan, dan (d) komunikasi. Sementara itu sektor unggulan yang ditetapkan dalam Misi Pembangunan Daerah periode 2007-2012 di Provinsi Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai Dasa Bhakti Era EMAS adalah (a) kelautan, (b) pertambangan dan energi, (c) perindustrian dan perdagangan, dan (d) perbankan dan penanaman modal. Implikasi dari penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dalam menetapkan perencanaan pembangunan daerah yang terdapat dalam APBD sebaiknya menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan Tabel I-O. Jika pemerintah daerah memfokuskan belanja daerah pada sektor-sektor yang menjadi sektor kunci dalam perekonomian sesuai dengan analisa Tabel I-O, maka kualitas belanja daerah akan meningkat dan menciptakan nilai tambah yang lebih dan *multiplier effect* yang lebih besar dalam perekonomian.

Kata kunci: perencanaan pembangunan, belanja, kualitas, tabel Input Output, sektor kunci

Mandala Harefa (P3DI Setjen DPR-RI)

STRUKTUR PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR POTENSIAL KOTA BATAM DAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JEKP, Vol. 4 No. 2, Desember 2013, hal. 175-193

Abstrak

Kebijakan desentralisasi melalui pemberian kewenangan daerah dalam menentukan perencanaan dan arah pembangunan perekonomian, menuntut pemerintah daerah berupaya lebih serius dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan sebagai sektor potensial. Implementasi otonomi yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, dalam pelaksanaan di beberapa daerah otonom belum menunjukkan hasil yang diharapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut bisa terjadi pada daerah otonom mengingat masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan potensi ekonominya. Demikian pula bila melihat secara spesifik Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu provinsi yang memiliki karakteristik berpeluang dalam menggali berbagai potensi ekonomi yang ada dalam rangka menjadikan basis ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Untuk itu dalam menganalisis masalah ini, diambil studi Kota Batam dan Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk mengetahui dan membandingkan struktur, pola pertumbuhan dan potensi yang menjadi basis ekonomi. Dengan menggunakan data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, baik pertumbuhan, kontribusi, dan per kapitanya akan diketahui potensi basis ekonomi kedua wilayah tersebut. Melalui metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu metode dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan alat analisis *Location Quotients* (LQ). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Batam dan Kabupaten Karimun memiliki basis ekonomi yang berbeda, di mana Karimun memiliki potensi ekonomi lebih banyak sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menjadi andalan. Namun demikian, Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang merupakan kawasan perdagangan bebas, belum mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Kata kunci: desentralisasi, otonomi, pertumbuhan ekonomi, basis ekonomi, sektor potensial, PDRB

Lukman Adam (P3DI Setjen DPR-RI) dan **T. Ade Surya** (P3DI Setjen DPR-RI)

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

JEKP, Vol. 4 No. 2, Desember 2013, hal. 195-211

Abstrak

Pengembangan sektor perikanan hanya dapat dirumuskan secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan pengguna sumber daya tersebut. Sektor perikanan, baik perikanan budi daya maupun perikanan tangkap, sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan hutan mangrove. Saat ini, kondisi ekosistem pesisir sangat menurun. Salah satu bentuk pelestarian ekosistem pesisir dilakukan dengan menetapkan kawasan konservasi laut di wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara parsial, harus memperhatikan faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial secara terintegrasi.

Kata kunci: perikanan budi daya, perikanan tangkap, ekosistem pesisir, kawasan konservasi laut, terintegrasi

Eka Budiyantri (P3DI Setjen DPR-RI)

PENGARUH *BUDGET DEFICIT* TERHADAP *CURRENT ACCOUNT DEFICIT*: STUDI EMPIRIS DI ASEAN-5

JEKP, Vol. 4 No. 2, Desember 2013, hal. 213-224

Abstrak

Penelitian empiris mengenai *twin deficit* (*budget deficit* dan *current account deficit*) telah banyak dilakukan di banyak negara dengan metode dan hasil yang berbeda-beda. Tetapi belum ada yang memasukkan pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap *current account deficit*. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengestimasi hubungan antara *current account deficit* dan *budget deficit* dari perekonomian ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Phillipina). Secara spesifik, diuji validitas *twin deficit* dan mempertimbangkan pengaruh indikator keterbukaan ekonomi antar negara yaitu *trade openness* terhadap *current account deficit*. Hasil dari analisis data panel perekonomian ASEAN-5 periode tahun 2006-2012, *current account deficit* tidak merespon perubahan yang terjadi pada *budget deficit*. Hasil ini mendukung teori konvensional hubungan positif antara *budget deficit* dan *current account deficit* meskipun tidak signifikan terjadi pada perekonomian ASEAN-5. Selain itu, tabungan dan investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *current account deficit*. Meningkatnya satu persen tabungan dan investasi mendorong *current account deficit* meningkat/menurun masing-masing sebesar 0,98 dan 0,92 persen. Hasil estimasi juga menunjukkan *trade openness* tidak mempengaruhi *current account deficit* pada perekonomian ASEAN-5.

Kata kunci: defisit kembar, data panel, *current account deficit*, *budget deficit*

Deny Dwi Hartono (Universitas Sebelas Maret) dan Malik Cahyadin (Universitas Sebelas Maret)

PEMERINGKATAN FAKTOR KEBERLANGSUNGAN USAHA INDUSTRI KREATIF DI KOTA SURAKARTA

JEKP, Vol. 4 No. 2, Desember 2013, hal. 225-236

Abstrak

Industri kreatif di Kota Surakarta merupakan salah satu jenis industri yang berkembang cukup baik. Terdapat delapan faktor yang menjadi penentu keberlangsungan usaha di antaranya adalah faktor keluarga, kebijakan pemerintah, kemitraan usaha, dan manajemen usaha. Permasalahannya adalah faktor-faktor tersebut belum diperingkat berdasarkan prioritasnya dalam keberlangsungan usaha. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemeringkatan faktor-faktor penentu keberlangsungan usaha industri kreatif di Kota Surakarta. Metode analisis penelitian adalah *analytic hierarchy process* (AHP). Metode *sampling* penelitian adalah *purposive sampling* dan jumlah responden penelitian adalah dua puluh pelaku usaha industri kreatif di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas faktor penentu keberlangsungan usaha industri kreatif di Kota Surakarta adalah faktor keluarga, kondisi lingkungan, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, kemitraan usaha, manajemen dan keuangan, produksi, pasar dan pemasaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka rekomendasinya adalah (a) langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha terkait erat dengan prioritas faktor penentu keberlangsungan usaha, dan (b) langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terkait erat dengan kebijakan pengembangan usaha kreatif dan integrasi pelaksanaan program dengan berbagai instansi.

Kata kunci: pemeringkatan, keberlangsungan usaha, industri kreatif, AHP

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 4 NO. 2, DECEMBER 2013

ISSN: 2086-6313

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge

Ari Mulianta Ginting (P3DI Setjen DPR-RI) and **Galuh Prila Dewi** (P3DI Setjen DPR-RI)

THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH AND FINANCIAL SECTOR ON POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA

JEKP, Vol. 4 No. 2, December 2013, pp. 117-130

Abstract

Indonesia has the 4th largest population in the world. Large population will give an impact on the poverty if it is not followed by an increase in the quality of the population. The poverty in Indonesia has been declining since 1976. This study has two purposes. The first is to determine the effect of economic growth on poverty reduction in Indonesia. The second is to determine the effect of growth of financial sector to poverty reduction in Indonesia. To assess these effects, this study uses VAR method by focusing on data from year 2000 through 2012. The results of this study showed that economic growth has negative and significant impact on the poverty, the financial sector has no significant effect on poverty reduction in Indonesia.

Keywords: *poverty, economic growth, financial development*

Izzaty (P3DI Setjen DPR-RI) and **Rafika Sari** (P3DI Setjen DPR-RI)

THE MINIMUM WAGE POLICY IN INDONESIA

JEKP, Vol. 4 No. 2, December 2013, pp. 131-145

Abstract

The setting of minimum wage roles in improving the wages of under paid employees. The ideal minimum wage also be able to meet the expectations of workers, employers and job seekers. In addition to minimum wage, the policy also has impact throughout on it is distribution, informal workers, price, business climate, and employment. This study aims to determine the stage of minimum wages and policies that affect the determination of minimum wage in Indonesia. Discusses the methods used in this study is descriptive methods by utilizing secondary data and existing publications. Minimum wage is still facing problems such as adhoc mechanism and unpredictable minimum wages. Determination of minimum wage policy minimum wage that is currently only pays attention to the decent living needs and does not pay attention to other factors such as economic growth, productivity, and marginal businesses. Government needs to be careful in raising the minimum wage to avoid a number of problems such as high levels of non-compliance and impede expansion of employment.

Keywords: *minimum wage policy, productivity, decent living needs, workers*

Misdawita (University of Indonesia) and A. Arini Putri Sari (University of Indonesia)

ANALYSIS OF THE IMPACT OF GOVERNMENT SPENDING ON HEALTH, EDUCATION, AND SUBSIDY TO POVERTY IN INDONESIA

JEKP, Vol. 4 No. 2, December 2013, pp. 147-161

Abstract

Poverty in Indonesia is not a new issue anymore. Beside an unemployment and inequality, poverty is classical and basic problem. The purpose of this paper is to know how the impact of government spending on health, education, and subsidy to the poverty in Indonesia. This paper uses Error Correction Model (ECM) and Ordinary Least Square (OLS) estimation. The result of this paper found that education effectively reduces the number of poverty, but have a different result for government spending on health and subsidy because of improper users target in the field.

Keywords: government spending, health, education, subsidy, poverty

Rita Helbra Tentrini (Finance Ministry)

THE DEVELOPMENT PLANS BASED ON INPUT OUTPUT TABLE ANALYSIS YEAR 2005: CASE STUDY IN THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG

JEKP, Vol. 4 No. 2, December 2013, pp. 163-174

Abstract

This study wants to evaluate the development plans in the province of Bangka Belitung using Input Output (I-O) Table analysis year 2005. Research method using quantitative descriptive analysis, which comes from secondary data, documents and literature related to this study. This study use the analysis of Indeks Daya Penyebaran (IDP) or forward linkages effect ratio and Indeks Derajat Kepekaan (IDK) or backward linkages effect ratio, that came from the processing of I-O table. From the processing of I-O table there are 4 key sectors that have the IDP and IDK above average (> 1), namely: (i) building; (ii) iron and steel industry; (iii) building business and corporate services; and (iv) communication. Meanwhile the leading sectors that have been concerned in the mission of regional development period 2007-2012 in the province of Bangka Belitung known as Dasa Bhakti Era EMAS are: (i) marine, (ii) mining and energy, (iii) industry and trade, and (iv) banking and investment. The implications of this study, it is expected that regional governments in determining regional development plans contained in the APBD, should use the information that came from the processing of I-O table. If the regional government focus their spending on sectors that became a key sector in the economy according to I-O table analysis, then the quality of spending will increase and create more added value and greater multiplier effect on the economy.

Keywords: the development plans, spending, quality, Input Output table, key sectors

Mandala Harefa (P3DI Setjen DPR-RI)

ECONOMIC GROWTH STRUCTURE AND POTENTIAL SECTORS OF BATAM MUNICIPAL AND KARIMUN REGENCY OF THE RIAU ISLANDS PROVINCE

JEKP, Vol. 4 No. 2, December 2013, pp. 175-193

Abstract

Decentralization policy through provision of local authority in determining the planning and economic development direction has put local governments in a more serious position in their attempts to optimize all the potentials to be developed. Implementations of local autonomy within the last decade, in several autonomous regions, have not shown the expected results as perceived by the public. This recurring problem is due to some existing issues within autonomous regions in their effort to develop their economic potentials. Some particular overview on Riau Islands Province showed that the province has a lot of potentials to explore. Its potentials are in relations to support economic development. For that reason, an analysis has been conducted in Batam Municipal and Karimun Regency in order to determine and compare the structure, growth patterns and its potentials as an economic base. By using secondary data of Gross Regional Domestic Product (GRDP) at Constant Prices for growth, contribution, and per capita will be known potentials economic base in both regions. Using a data collection method, that is documentation method, analysis is conducted using analysis tool of Location Quotients (LQ). The analysis showed that Batam Municipal and Karimun Regency have a different economic base. Karimun Regency has more economic potentials as the basis of economic growth that should be the mainstay of the Regency compare to Batam Municipal. Nevertheless, although Batam Municipal and Karimun Regency are free trade areas, they have not reached the expected level of economic growth.

Keywords: decentralization, autonomy, economic growth, economic base, potential sectors, GRDP

Lukman Adam (P3DI Setjen DPR-RI) and T. Ade Surya (P3DI Setjen DPR-RI)

SUSTAINABLE FISHERIES DEVELOPMENT POLICY IN INDONESIA

JEKP, Vol. 4 No. 2, December 2013, pp. 195-211

Abstract

Development of the fisheries sector can only be defined precisely by taking into account the need of users of these resources. Fisheries sector, both aquaculture and capture fisheries, is very dependent on the sustainability of coastal ecosystems, particularly coral reefs and mangrove forests. Currently, the condition of coastal ecosystems decreases. One form of preservation of coastal ecosystems is done by setting a marine conservation area in the region that has a high biodiversity. Sustainable fisheries development policy can not be done partially but it must take into account the environmental, economic, and social integration.

Keywords: aquaculture, capture fisheries, coastal ecosystems, marine protected areas, integrated

Eka Budiyantri (P3DI Setjen DPR-RI)

THE EFFECT OF BUDGET DEFICIT TO CURRENT ACCOUNT DEFICIT: EMPIRICAL STUDY IN ASEAN-5

JEKP, Vol. 4 No. 2, December 2013, pp. 213-224

Abstract

The empirical studies about twin deficit (budget deficit and current account deficit) have been carried out in many countries with different methods and results. But no one has included the effect of economic openness to current account deficit. The main objective of this study is to estimate the effect of budget deficit to current account deficit for ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and Phillipines) economies. Particularly examined the validity of twin deficit and consider the effect of open economy indicator which is trade openness to current account deficit. From panel data analysis of ASEAN-5 economy for period 2006-2012, the current account deficit doesn't respond to the changes in budget deficit. This evidence supports the conventional theory of a positive relationship between fiscal and external balances although doesn't significant in ASEAN-5 economies. Furthermore, saving and investment have significant effect to current account balance. A rise by one percent of the saving and investment induces the current account deficit to increase or decrease by 0.98 and 0.92 percentage points respectively. The estimation results also show that trade openness doesn't affect current account deficit in ASEAN-5 economy.

Keywords: twin deficit, panel data, current account deficit, budget deficit

Deny Dwi Hartono (University of Sebelas Maret) and **Malik Cahyadin** (University of Sebelas Maret)

A RATING FACTOR OF BUSINESS CONTINUITY FOR CREATIVE INDUSTRIES IN SURAKARTA MUNICIPAL

JEKP, Vol. 4 No. 2, December 2013, pp. 225-236

Abstract

Creative industries in Surakarta Municipal is one of industry that growing well. There are eight factors that determine the continuity of creative industries such family factor, government policy, business partnerships, and business management. The problem is that factors has not been rated by priority in business continuity. Based on it, the purpose of this study is to analyze the rating factors of determinant business continuity for creative industries in Surakarta Municipal. Research analysis method is analytic hierarchy process (AHP). Research sampling method was purposive sampling and number of respondents are twenty persons creative industry entrepreneurs in Surakarta Municipal. The results showed that the priority factors of business continuity for creative industry in Surakarta Municipal are family, environmental condition, government policy, economic condition, business partnerships, management and financial, production, market and marketing. Based on these results, the recommendations of this research are (a) the steps that need to be carried out by entrepreneurs are closely related to the priority factors of business continuity, and (b) the steps being taken by the Government of Surakarta Municipal closely related to the development policy of creative industry and integration of business programs with various agencies.

Keywords: rating, business continuity, creative industry, AHP